

Daftar Pustaka

- Abdul Wahab, Solichin. (2008). *“Analisis Kebijakan : Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara Edisi Kedua*. Bumi Aksara : Jakarta.
- Abdussalam dan DPM Sitompul, Sistem Peradilan Pidana, Restu Agung, Jakarta, 2007, hlm. 5-6.
- Angkasa, Over Capacity Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan, Faktor Penyebab, Implikasi Negatif, serta Solusi dalam Upaya Optimalisasi Pembinaan Narapidana, Jurnal Dinamika Hukum Vol.10 No.3, 2010.
- Arfina Osman, F. (2002). Public Policy Making: Theories and their Implications in Developing Countries. *Asian Affairs*, 24(3), 37–52.
- Bryman, A. (2012). Social Research Methods. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
<http://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>.
- D.Lasswel, H. (1971). A Pre-View of Policy Science. Diakses melalui <http://www.policysciences.org/classics/preview.pdf>
Detik News pada Kamis, 08 November 2012
- Dunn, William N., 2004 (1981), *Public Policy Analysis: An Introduction*, New Jersey: Pearson Education.
- Edi Swasono, Sri. (2003). *Ekspose Ekonomika*. Jakarta:UIP.
- Hikmawati,Puteri. Mendesaknya Perbaikan Pengelolaan Lapas Pascapenangkapan Kepala Lapas Sukamiskin, *Info Singkat Vol.X No.15/I/Puslit/Agustus/2018*.
- Irawan, (2007). *Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, Depok: Departemen FISIP UI. Hlm. 43.
- Kompas Internasional, *“Kekurangan Tahanan, Belanda Berencana Tutup 4 Penjara”*. Diakses melalui <https://internasional.kompas.com/read/2018/06/21/19534871/kekurangan-tahanan-belanda-berencana-tutup-4-penjara>
- Kompas.com,“Ombudsman Temukan Dugaan Malaadministrasi di Rutan Depok” diakses melalui

<https://megapolitan.kompas.com/read/2019/03/06/12444481/ombudsmante-mukan-dugaan-malaadminstrasi-dan-pungli-di-rutan-depok>

LAKIP Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Diakses melalui www.kemenkumham.go.id

Moleong, Lexy J. (2007). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Lasswell, H. D., & Kaplan, A. (1970). Power and Society: A Framework for Political Inquiry. <https://doi.org/10.2307/2087983>

Mackay, M. (2005). “What is Policy? What is Public Policy? Who Makes Public Policies? What is the Public Policy Cycle? Who is Involved in the Policy Cycle?”.(3), 1–5.

McGovern, P., & Yacobucci, P. (1999). *Lasswellian Policy Sciences and the Bounding of Democracy*.

Mariana, D. (2013). Partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 1(2), 216–229.

Maryani, Desy. Faktor-Faktor Penyebab Tidak Tercapainya Tujuan Pemidanaan Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia, *Jurnal Hukum Sehasen Vol.1 No.1*, 2015.

Nugroho, Riant. 2014. Public Policy. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.

OkeNews “3 Kasus Kerusuhan dan Napi Kabur dari Lapas, Nomor Terakhir Ulah WNA” diakses melalui <https://news.okezone.com/read/2018/12/01/337/1985369/3kasuskerusuhan-dan-napi-kabur-dari-lapas-nomor-terakhir-ulah-wna>

Peraturan Pemerintah No.28 tahun 2006 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No: M.HH-OT.02.02 Tahun 2009 tentang Cetak Biru Pembaharuan Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan.

Peraturan Pemerintah No.99 tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Peraturan Menteri No.11 tahun 2017 tentang Grand Design Penanganan Overcrowded pada Rutan dan Lapas.

Peraturan Menteri No.35 tahun 2018 tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Masyarakat.

Ramdhani, Abdullah; dan Ramdhani, M. A. (2017). Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik. *Jurnal Publik*, 11(February), 1–12. Diakses melalui <file:///C:/Users/User/Downloads/JP1101-RamdhaniRamdhani.pdf>

Romaida H, Rugun. Problematika Lembaga Masyarakat dalam Sistem Peradilan Terpadu, *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni*, Vol.1 No.1, April 2017.

Rumadan, Ismail. Problem Lembaga Masyarakat di Indonesia dan Reorientasi Tujuan Pemidanaan, *Jurnal Hukum dan Peradilan* Vol.2 No.2, 2013.

Sugiyono. (2007). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Efabeta

Suwahju, Anggara. ICJR: Rutan dan Lapas di Indonesia Sudah Extreme Crowding, Oktober 2018. Diakses melalui www.nasional.kompas.com

Tatang M. Amirin. *Pokok-pokok Teori Sistem*. Rajawali, Jakarta, 1986, hlm. 5.

Taufiqurokman. (2014). *Kebijakan Publik: Pendelegasian Tanggung Jawab Negara Kepada Presiden Selaku Penyelenggara Pemerintahan*, (1993). Diakses melalui [http://www.policysciences.org/library/PS/ps\(full\).pdf](http://www.policysciences.org/library/PS/ps(full).pdf)

Tiesdel. (1996). *Revitalizing Historic Urban Quarters*. Architectural Press, Oxford.

Tim Peneliti MaPPI FHUI, *Menunggu Perubahan Dari Balik Jeruji*, Jakarta:Kemitraan, 2007, hal.2.

Undang-Undang No.12 tahun 1995 tentang Masyarakat.

Undang-Undang No.8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Voa Indonesia : “Indonesia Diminta Tiru Belanda Tangani Lapas” diakses melalui <https://www.voaindonesia.com/a/indonesia-diminta-tiru-belanda-tangani-lapas/4583832.html>

Wahyuni, D. (2012). The Research Design Maze: Understanding Paradigms, Cases, Methods and Methodologies,49(4),564–576.

[http://doi.org/10.1675/1524-4695\(2008\)31](http://doi.org/10.1675/1524-4695(2008)31)

Widjaja, Martokusumo. (2000). *Revitalisasi Kawasan Kota Sebuah Catatan dalam Pengembangan dan Pemanfaatan Kawasan Kota*.

Winarno, Budi. (2012). “Kebijakan Publik : Teori, Proses dan Studi Kasus”.

CAPS : Yogyakarta